



TAJUK RENCANA

Vaksinasi untuk Pulihkan Ekonomi

ANTARA kepentingan ekonomi dan kesehatan tak bisa dipertentangkan, melainkan harus diselaraskan. Terlebih, dua aspek tersebut sama pentingnya dan saling terkait sehingga harus berjalan beriringan. Dalam konteks itulah kita mengapresiasi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Yogyakarta yang melaksanakan vaksinasi massal tahap kedua bagi pekerja publik. Mereka yang divaksinasi terdiri atas pedagang pasar, buruh gendong, petugas parkir, petugas keamanan, pedagang kaki lima (PKL), pegawai toko, pelaku usaha, pengayuh becak serta kusir andong (KR, 2/3). Para pekerja publik ini kebanyakan bekerja di kawasan Malioboro.

Vaksinasi kepada pekerja publik ini kita nilai sebagai langkah yang strategis karena mereka kelompok yang paling rentan lantaran sering berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan sebelumnya beberapa di antaranya menjadi klaster penyebaran Covid-19. Dengan divaksinasi mereka, paling tidak, bisa mencegah atau sekurang-kurangnya meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Kita juga patut mengapresiasi kesadaran para pekerja publik untuk divaksin, mereka dengan penuh kesadaran mengantre untuk mendapatkan vaksin guna memperkuat imun. Dengan melihat antusiasme pekerja publik untuk divaksin, rasanya tidak perlu pemerintah daerah menerapkan denda atau sanksi kepada mereka yang menolak vaksin, karena diyakini jumlahnya tidak signifikan. Mereka nampaknya juga sudah paham bahwa vaksinasi bukan hanya untuk kepentingan pribadi perorangan, melainkan kepentingan yang lebih besar yakni masyarakat. Konkretnya, dengan divaksin maka peluang penyebaran Covid-19 menjadi lebih kecil.

Meski demikian, sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah boleh saja, bila dianggap perlu, membuat aturan yang mengandung sanksi bagi penolak

vaksin, namun sifatnya administratif bukan pidana. Itupun penerapannya harus selektif, yakni bila tindakan seseorang dirasa membahayakan orang lain. Kebijakan mewajibkan pekerja publik tes antigen tiap tiga hari sekali, bagi mereka yang menolak vaksinasi, rasanya sudah cukup tegas dan bisa mendorong seseorang untuk memilih divaksin.

Selain terkait aspek kesehatan, vaksinasi kepada pekerja publik juga akan membawa pengaruh signifikan bagi pemulihan ekonomi di Yogya. Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi terseok-seok. Bahkan tak sedikit pelaku ekonomi yang tak bisa melanjutkan usahanya alias gulung tikar. Sedang sebagian lainnya masih bisa bertahan meski penuh keterbatasan.

Dalam kaitan itulah kita melihat vaksinasi kepada pekerja publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi di Yogya. Sebab, dengan divaksin yang diyakini mampu meningkatkan imun tubuh, mereka lebih tenang dalam menjalankan usahanya serta tak selalu waswas terhadap ancaman terpapar Covid-19. Mereka juga lebih tenang ketika berinteraksi dengan orang lain. Walau demikian, bukan berarti mereka boleh mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Sebab vaksinasi bukanlah pengganti prokes.

Kita berharap seluruh pekerja publik divaksinasi, sepanjang memenuhi standar kesehatan. Tak hanya itu, seluruh penduduk di DIY yang memenuhi syarat berhak mendapat vaksin agar hidup sehat. Mereka yang selama ini belum divaksinasi, tentu tak bisa dianggap menolak, melainkan menunggu giliran. Sayangnya, sebagaimana diungkapkan Wapres Ma'ruf Amin, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia masih lambat, baru 10 persen dari target 1 juta warga yang divaksin perhari. Kalau bisa dipercepat, mengapa harus lambat? □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005